

DETERMINAN *ACCOUNTING FRAUD PROPENSITY* DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI DAN INDIVIDU

Ni Nyoman Ayu Suryandari

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar

email: ayusuryandari@unmas.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of internal control structure, compensation fairness, information opacity, accounting compliance, and ethical reasoning on accounting fraud propensity in Village Credit Institutions (LPD) in Denpasar City. This study uses a quantitative approach with an associative design. Data were collected through questionnaires distributed to 105 respondents selected using a purposive sampling technique. A total of 104 questionnaires were analyzed using multiple linear regression. The results show that internal control structure, compensation fairness, information opacity, accounting compliance, and ethical reasoning have a positive effect on accounting fraud propensity. This finding suggests that information opacity tends to increase accounting fraud propensity, while other variables that are normatively expected to suppress fraud have not demonstrated an effective preventive function in organizational practice. The theoretical contribution of this study lies in strengthening the understanding of the complexity of accounting fraud determinants through organizational and individual perspectives in the context of LPD. In practice, LPDs need to minimize information opacity because it can increase the opportunity for fraud to occur, as well as evaluate the implementation of internal control structures, compensation fairness, accounting compliance, and ethical reasoning so that they do not stop at the formality level, but truly function as fraud prevention mechanisms.

Keywords: *Accounting Fraud Propensity; Internal Control Structure; Compensation Fairness; Information Opacity; Accounting Compliance; Ethical Reasoning.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur pengendalian internal, *compensation fairness*, *information opacity*, *accounting compliance*, dan penalaran etis terhadap *accounting fraud propensity* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 105 responden yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Sebanyak 104 kuesioner dapat dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pengendalian internal, *compensation fairness*, *information opacity*, *accounting compliance*, dan penalaran etis berpengaruh positif terhadap *accounting fraud propensity*. Temuan ini menunjukkan bahwa *information opacity* cenderung memperbesar *accounting fraud propensity*, sedangkan variabel lain yang secara normatif diharapkan mampu menekan *fraud* justru belum menunjukkan fungsi pencegahan yang efektif dalam praktik organisasi. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman mengenai kompleksitas determinan kecurangan akuntansi melalui perspektif organisasi dan individu dalam konteks LPD. Secara praktis, LPD perlu meminimalkan *information opacity* karena dapat memperbesar peluang terjadinya kecurangan, serta mengevaluasi penerapan struktur pengendalian internal, *compensation fairness*, *accounting compliance*, dan penalaran etis agar tidak berhenti pada tataran formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pencegahan *fraud*.

Kata Kunci: *Accounting Fraud Propensity; Struktur Pengendalian Internal; Compensation Fairness; Information Opacity; Accounting Compliance; Penalaran Etis.*

1. PENDAHULUAN

Accounting fraud merupakan salah satu persoalan penting dalam pengelolaan organisasi karena dapat menimbulkan kerugian ekonomi, menurunkan kualitas laporan keuangan, serta melemahkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas lembaga.

Fraud tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga pada reputasi, tata kelola, dan keberlanjutan organisasi. Secara global, ACFE (2024) melaporkan bahwa organisasi diperkirakan kehilangan 5% pendapatannya setiap tahun akibat fraud. Berdasarkan hasil survei tersebut, di antara korupsi,

penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan, jenis fraud yang menimbulkan kerugian tertinggi adalah kecurangan laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa accounting fraud masih menjadi persoalan serius karena dapat menurunkan kualitas laporan keuangan, melemahkan akuntabilitas organisasi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana (Irianto et al., 2025). Fraud tidak hanya muncul dalam bentuk manipulasi pencatatan, tetapi juga melalui penyembunyian informasi, pelanggaran prosedur, dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, fraud tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis akuntansi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tata kelola, distribusi informasi, serta cara individu menilai benar dan salah dalam menjalankan pekerjaannya (Suryandari et al., 2023b).

Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap akuntabilitas, transparansi, dan *fairness* dalam pengelolaan dana terus meningkat. Di satu sisi, dana yang besar dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan. Namun di sisi lain, dana yang besar juga menuntut pengawasan yang lebih efektif. Ketika pengawasan tidak berjalan baik, peluang terjadinya penyimpangan akan meningkat. Situasi ini relevan bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD), karena LPD juga mengelola dana masyarakat dan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Selain itu maraknya kasus kecurangan yang terjadi pada LPD. Oleh sebab itu, *accounting fraud propensity* pada LPD perlu dikaji lebih serius.

Dari perspektif *governance*, pengendalian internal merupakan salah satu mekanisme utama untuk mencegah *fraud*. Penelitian pada organisasi perangkat daerah di Kota Denpasar oleh Dewi et al. (2024), menunjukkan bahwa struktur pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *tendency of accounting fraud*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal, semakin rendah *accounting fraud propensity*. Hasil tersebut menegaskan pentingnya kejelasan pembagian tugas, pengawasan yang konsisten, otorisasi transaksi yang andal, dan pemantauan yang memadai dalam menekan peluang terjadinya *fraud*. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa struktur pengendalian yang baik tetap

menjadi fondasi penting dalam upaya pencegahan *fraud* (Coram et al., 2008).

Selain *governance*, faktor informasi juga penting dalam menjelaskan *fraud*. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang beragam. Putra & Putra (2025) menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh langsung terhadap *fraud propensity* pada pemerintahan desa. Meskipun demikian, penelitian tersebut tetap menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pembahasan *fraud*. Di sisi lain, Dewi et al. (2024) menunjukkan bahwa *information asymmetry* berpengaruh positif terhadap *tendency of accounting fraud*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar ketimpangan informasi, semakin tinggi kecenderungan *fraud*. Hal tersebut menggambarkan bahwa persoalan utama bukan hanya ada atau tidaknya transparansi, tetapi juga seberapa besar kesenjangan informasi yang terjadi dalam organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis *information opacity* untuk menangkap kondisi ketika informasi tidak sepenuhnya terbuka, tidak merata, dan lebih banyak dikuasai oleh pihak tertentu. Dalam konteks LPD, *information opacity* layak diuji karena LPD memiliki karakter kelembagaan lokal yang khas dan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat.

Faktor organisasional lain yang juga berhubungan dengan *fraud* adalah *compensation fairness*. Penelitian Dewi et al. (2024) menunjukkan bahwa *compensation fairness* berpengaruh negatif terhadap *tendency of accounting fraud* pada organisasi perangkat daerah di Kota Denpasar. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika pegawai merasa imbalan yang diterima sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya, dorongan untuk melakukan penyimpangan akan menurun. Temuan ini memberikan dasar bahwa *compensation fairness* dapat digunakan sebagai variabel yang menjelaskan *accounting fraud propensity*. Dalam praktik organisasi, ketidakadilan kompensasi dapat menimbulkan rasa kecewa, mendorong pembenaran atas perilaku menyimpang, dan pada akhirnya membuka ruang bagi tindakan *fraud*.

Selanjutnya, *accounting compliance* juga menjadi elemen penting dalam pencegahan

fraud. Nasution et al. (2023) menunjukkan bahwa *accounting compliance* berpengaruh negative terhadap *accounting fraud*. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar pencatatan dan pelaporan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk disiplin organisasi dalam menjaga keandalan informasi keuangan. Ketika aturan akuntansi dijalankan dengan konsisten, peluang manipulasi dan penyimpangan menjadi lebih sempit. Sebaliknya, ketika kepatuhan rendah, ruang untuk terjadinya *fraud* akan semakin terbuka. Oleh karena itu, *accounting compliance* layak diposisikan sebagai salah satu determinan penting dalam penentu *fraud*.

Di samping faktor organisasional, faktor individual juga perlu diperhatikan. *Fraud* tidak hanya terjadi karena lemahnya sistem, tetapi juga karena individu memilih untuk membenarkan tindakan yang salah. Dalam konteks ini, penalaran etis menjadi penting. Supriyadi & Prasetyaningsih (2021) menunjukkan bahwa penalaran etis berperan dalam respons individu terhadap tindakan salah melalui *whistleblowing*. Selain itu, Uddin & Gillett (2002) juga menunjukkan bahwa penalaran etis berkaitan dengan niat melakukan pelaporan keuangan secara curang. Hal ini memperlihatkan bahwa individu dengan penalaran etis yang lebih baik cenderung lebih mampu menolak tindakan *fraud*.

Berdasarkan uraian tersebut, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang beragam mengenai determinan *accounting fraud propensity*. Pada aspek struktur pengendalian internal, Dewi et al. (2024) dan Nasution et al. (2023) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*, sehingga pengendalian dipandang sebagai mekanisme yang mampu menekan peluang kecurangan. Pada aspek *compensation fairness*, Dewi et al. (2024) juga menemukan pengaruh negatif terhadap *tendency of accounting fraud*, sedangkan Dasuki & Yudawati (2022) menempatkan kesesuaian kompensasi sebagai faktor yang secara normatif diharapkan dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun, pada aspek informasi, hasil penelitian menunjukkan arah yang tidak sepenuhnya sama. Putra & Putra (2025)

menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh langsung terhadap *fraud propensity* pada pemerintahan desa, sedangkan Dewi et al. (2024) menunjukkan bahwa *information asymmetry* berpengaruh positif terhadap *tendency of accounting fraud*. Pada aspek *accounting compliance*, Nasution et al. (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan akuntansi berperan dalam menekan *accounting fraud*, sedangkan Dasuki & Yudawati (2022) menggunakan ketaatan aturan akuntansi sebagai konstruk yang diarahkan untuk menjelaskan kecenderungan kecurangan akuntansi. Di sisi lain, kajian mengenai penalaran etis masih lebih banyak dikaitkan dengan respons etis individu, seperti *whistleblowing*, sebagaimana ditunjukkan oleh Supriyadi & Prasetyaningsih (2021), serta niat pelaporan keuangan curang sebagaimana dijelaskan oleh Uddin & Gillett (2002), sehingga belum banyak diarahkan secara langsung pada *accounting fraud propensity* dalam konteks LPD. Dengan demikian, celah penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya faktor tata kelola, fairness, keterbukaan informasi, kepatuhan akuntansi, dan penalaran etis dalam satu model untuk menjelaskan *accounting fraud propensity* pada Lembaga Perkreditan Desa.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menguji *accounting fraud propensity* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar melalui pendekatan tata kelola, informasi, dan etika. Pemilihan LPD di Kota Denpasar didasarkan pada urgensi bahwa LPD merupakan lembaga keuangan berbasis desa adat yang mengelola dana masyarakat dan sangat bergantung pada kepercayaan krama desa. Karakteristik LPD yang dekat dengan masyarakat, memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal, serta mengelola transaksi keuangan secara berkelanjutan menjadikan aspek akuntabilitas dan pencegahan *fraud* sebagai isu yang penting untuk dikaji. Dalam konteks tersebut, lemahnya pengendalian internal, ketertutupan informasi, kepatuhan akuntansi yang bersifat formal, serta belum kuatnya perilaku etis berpotensi memperbesar *accounting fraud propensity*. Oleh karena itu, LPD di Kota Denpasar menjadi konteks yang relevan untuk menguji bagaimana faktor tata kelola, informasi, dan etika berperan

dalam menjelaskan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian lima determinan, yaitu struktur pengendalian internal, *compensation fairness*, *information opacity*, *accounting compliance*, dan penalaran etis, dalam satu model penelitian pada konteks LPD. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur *fraud* pada lembaga keuangan berbasis desa, sekaligus memberi kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola dan pencegahan *fraud* pada LPD.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori Agensi

Penelitian ini menggunakan *agency theory* sebagai landasan teoritis dalam menjelaskan *accounting fraud propensity*. *Agency theory* menjelaskan bahwa hubungan antara pihak yang memberi amanah dan pihak yang menerima amanah dapat menimbulkan konflik kepentingan. Konflik ini muncul ketika agen memiliki informasi lebih banyak dibanding prinsipal dan menggunakan keunggulan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks pengelolaan dana, kondisi ini dapat membuka ruang bagi *fraud* apabila tidak diimbangi dengan pengendalian yang memadai (Jensen & Meckling, 1976).

Fraud Triangle Theory

Fraud triangle theory dikembangkan oleh Cressey (1953) yang menjelaskan bahwa *fraud* muncul karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi. *Fraud* dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak etis, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan salah saji material. Karena itu, *accounting fraud propensity* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sistem, tetapi juga oleh faktor perilaku individu (Nasution et al., 2023).

Accounting fraud propensity

Accounting fraud propensity adalah kecenderungan individu atau organisasi untuk melakukan penyimpangan dalam proses pencatatan, pelaporan, atau pengelolaan keuangan. *Accounting fraud* dapat terjadi dalam bentuk manipulasi akun, penyalahgunaan aset, dan salah saji material dalam informasi keuangan. *Fraud* menjadi isu penting karena berhubungan langsung dengan akuntabilitas dan

kualitas pengelolaan keuangan (Nasution et al., 2023). Berdasarkan penelitian Putra & Putra (2025) *fraud propensity* dianggap sebagai variabel penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Struktur Pengendalian Internal dan *accounting fraud propensity*

Dalam perspektif *agency theory*, *fraud* dapat muncul ketika pihak pengelola memiliki informasi dan kendali yang lebih besar dibanding pihak yang memberi amanah. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyimpangan apabila tidak dibatasi oleh mekanisme pengendalian yang memadai. Struktur pengendalian internal berperan dalam memperjelas pembagian tugas, memperkuat otorisasi, meningkatkan pengawasan, dan memastikan bahwa setiap aktivitas dapat dipantau. Dengan adanya pengendalian yang baik, peluang agen untuk menyalahgunakan wewenang menjadi lebih kecil karena tindakan mereka lebih mudah dideteksi dan dievaluasi. Peluang melakukan *fraud* selaras dengan elemen *fraud theory*. Putra & Putra (2025) juga menegaskan bahwa dalam *agency theory*, pengawasan dan keterbukaan membantu masyarakat memahami serta mengawasi alokasi anggaran dan tindakan pengelola, sehingga kepentingan pribadi dapat ditekan.

Secara empiris, Dewi et al. (2024) menemukan bahwa struktur pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *tendency of accounting fraud* pada organisasi perangkat daerah di Kota Denpasar. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal, semakin rendah kecenderungan terjadinya *fraud*. Temuan ini juga didukung oleh Nasution et al. (2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud*. Selain itu, Coram et al. (2008) membuktikan bahwa pengendalian internal merupakan mekanisme penting dalam membatasi peluang melakukan *fraud*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa struktur pengendalian internal yang baik akan mempersempit kesempatan terjadinya *fraud* karena setiap tindakan lebih terawasi dan lebih sulit disembunyikan. Oleh sebab itu, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Struktur Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud propensity*.

Compensation fairness dan accounting fraud propensity

Konflik agensi dapat ditekan dengan adanya kompensasi yang adil kepada agent. Kompensasi yang adil dapat membentuk hubungan kerja yang lebih sehat antara organisasi dan pegawai. Ketika pegawai merasa bahwa imbalan yang diterima sepadan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya, mereka cenderung memiliki kepuasan kerja yang lebih baik dan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan pembenaran atas tindakan menyimpang. Pembenaran dalam melakukan *fraud* ini dikenal dengan istilah rasionalisasi dalam *fraud triangle theory*. Putra & Putra (2025) menjelaskan bahwa *fairness* berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban secara proporsional, tanpa diskriminasi, dan dengan akses yang setara terhadap sumber daya. Dalam konteks *fraud*, rasa keadilan dapat menurunkan dorongan individu untuk mencari keuntungan yang tidak sah sebagai bentuk kompensasi atas ketidakpuasan.

Dewi et al. (2024) menemukan *compensation fairness* berpengaruh negatif terhadap *tendency of accounting fraud*. Semakin sesuai kompensasi yang diterima pegawai, semakin rendah kecenderungan *fraud*. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa *fraud* dapat muncul ketika individu ingin memaksimalkan keuntungan pribadi dan merasa bahwa imbalan yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan kepada organisasi.

Berdasarkan teori dan temuan empiris tersebut, *compensation fairness* diperkirakan dapat menurunkan *accounting fraud propensity* karena rasa keadilan atas imbalan mengurangi ketidakpuasan dan pembenaran atas perilaku curang. Oleh sebab itu, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H₂: *Compensation fairness* berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud propensity*.

Information opacity dan accounting fraud propensity

Agency theory menjelaskan bahwa *fraud* lebih mudah terjadi ketika terdapat kesenjangan informasi antara agen dan prinsipal. Ketika informasi tidak tersedia secara terbuka, tidak merata, dan lebih banyak dikuasai oleh pihak

tertentu, peluang agen untuk menyembunyikan penyimpangan menjadi lebih besar. Dalam konteks ini, *information opacity* menggambarkan kondisi ketika informasi dalam organisasi tidak sepenuhnya transparan, sehingga memperbesar ruang bagi manipulasi, penyembunyian fakta, dan penyalahgunaan wewenang. Dalam *fraud triangle theory*, dikenal dengan *opportunity*.

Putra & Putra (2025) menegaskan bahwa transparansi membantu meminimalkan kesenjangan informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Artinya, ketika transparansi melemah, *information opacity* justru meningkat. Kondisi tersebut dapat memperlemah *governance* dan mengurangi efektivitas pengawasan.

Putra & Putra (2025) menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh langsung terhadap *fraud propensity* pada pemerintahan desa. Keterbukaan informasi seharusnya menurunkan *fraud* karena meningkatkan akuntabilitas. Dewi et al. (2024) juga menunjukkan bahwa *information asymmetry* berpengaruh positif terhadap *tendency of accounting fraud*. Artinya, semakin besar ketimpangan informasi, semakin tinggi kecenderungan *fraud*. Temuan ini memperkuat logika bahwa ketika *information opacity* semakin tinggi, maka *accounting fraud propensity* juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, *information opacity* diperkirakan meningkatkan *accounting fraud propensity* karena ketertutupan informasi memperbesar peluang penyimpangan dan mempersulit pengawasan. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H₃: *Information opacity* berpengaruh positif terhadap *accounting fraud propensity*.

Accounting compliance dan accounting fraud propensity

Accounting compliance merupakan bentuk disiplin organisasi dalam menjaga integritas laporan keuangan. Aturan akuntansi berfungsi sebagai pedoman agar pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika aturan tersebut dijalankan dengan baik, peluang manipulasi menjadi lebih kecil karena setiap transaksi harus mengikuti standar dan

prosedur yang jelas. Sebaliknya, pelanggaran terhadap aturan akuntansi akan membuka ruang bagi salah saji dan kecurangan. Dengan meningkatnya transparansi laporan keuangan maka konflik keagenan dapat ditekan.

Secara empiris, Nasution et al. (2023) menunjukkan bahwa *accounting compliance* berpengaruh terhadap *accounting fraud*. Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik *accounting compliance*, semakin rendah peluang terjadinya *fraud*. Selain itu, studi Dewi et al. (2024) juga menunjukkan bahwa *accounting compliance* merupakan faktor penting dalam menekan *fraud*. Dengan demikian, hasil-hasil empiris cenderung memperlihatkan bahwa *accounting compliance* merupakan instrumen pengendalian yang efektif.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, *accounting compliance* diperkirakan berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud propensity* karena kepatuhan pada standar akuntansi mempersempit ruang manipulasi dan penyimpangan. Oleh sebab itu, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: *Accounting compliance* berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud propensity*.

Penalaran etis dan *accounting fraud propensity*

Fraud triangle theory menjelaskan bahwa *fraud* tidak hanya dipengaruhi oleh peluang, tetapi juga oleh proses rasionalisasi individu dalam melakukan tindakan menyimpang. Dalam konteks ini, penalaran etis menjadi penting karena berkaitan dengan kemampuan seseorang menilai benar dan salah sebelum mengambil keputusan. Individu dengan penalaran etis yang baik cenderung lebih mampu menolak tindakan menyimpang karena memahami konsekuensi moral dari tindakannya. Uddin & Gillett (2002) juga menunjukkan bahwa penalaran etis berkaitan dengan niat melakukan pelaporan keuangan secara curang.

Supriyadi & Prasetyaningsih (2021) menunjukkan bahwa penalaran etis berperan dalam mendorong respons individu terhadap tindakan salah melalui *whistleblowing*. Ketika individu memiliki penalaran etis yang kuat, individu tersebut cenderung tidak mudah membenarkan perilaku *fraud* dan lebih berani menolak tindakan yang merugikan organisasi.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, penalaran etis diperkirakan berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud propensity* karena individu yang memiliki pertimbangan etis lebih baik akan lebih mampu menahan diri dari tindakan *fraud*. Oleh sebab itu, hipotesis kelima dirumuskan sebagai berikut:

H₅: Penalaran Etis berpengaruh negatif terhadap *accounting fraud propensity*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Lokasi penelitian adalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar sejumlah 35 LPD. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan responden yakni kepala atau pimpinan LPD, bendahara, dan teller karena ketiga jabatan tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan operasional dan keuangan lembaga. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan pada 35 LPD di Kota Denpasar yang berjumlah 516 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yakni kepala atau pimpinan LPD, bendahara, dan teller sebanyak 105 responden.

Seluruh item diukur menggunakan skala Likert 5 poin, dengan skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan skor 5 menunjukkan sangat setuju. Instrumen penelitian disusun dengan mengadaptasi kuesioner dari penelitian terdahulu. Variabel struktur pengendalian internal diadaptasi dari Dewi et al. (2024), *compensation fairness* dan *accounting compliance* diadaptasi dari Dasuki & Yudawati (2022), *information opacity* dan penalaran etis diadaptasi dari Yulitasari (2019), dan *accounting fraud propensity* diadaptasi dari Suryandari et al. (2023).

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, data dianalisis dengan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Statistik deskriptif dilakukan dengan *three box method* dengan kategori:

Nilai 1.00 – 2.33 : kategori rendah

Nilai 2.34 – 3.66 : kategori sedang

Nilai 3.67 – 5.00 : kategori tinggi

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Model analisis yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$AFP = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 CF + \beta_3 IO + \beta_4 AC + \beta_5 PE + e$$

Keterangan: AFP = *Accounting fraud propensity*; α = konstanta; β_1 - β_5 = koefisien regresi; SP = Struktur Pengendalian Internal; CF = *Compensation fairness*; IO = *Information opacity*; AC = *Accounting compliance*; PE = Penalaran Etis dan e = error.

Tabel 1. Definisi Operasional

Definisi Operasional	Indikator
Struktur Pengendalian Internal (SP)	
Persepsi responden mengenai kualitas mekanisme pengendalian dalam organisasi yang mencakup kebijakan, prosedur, pengawasan, dan pemantauan untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (Dewi et al., 2024).	5 (lima) pernyataan terkait lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan
Compensation fairness (CF)	
Persepsi responden mengenai tingkat keadilan imbalan yang diterima dibandingkan dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Konstruksi ini dikembangkan dari konsep kesesuaian kompensasi yang menekankan keadilan pemberian balas jasa kepada pegawai (Dasuki & Yudawati, 2022).	5 (lima) pernyataan terkait gaji, upah, insentif, tunjangan, dan fasilitas
Information opacity (IO)	
Persepsi responden mengenai tingkat ketertutupan dan ketidakmerataan informasi dalam organisasi, sehingga pihak tertentu memiliki informasi yang lebih banyak dibanding pihak lain (Yulitasari, 2019).	5 (lima) pernyataan terkait situasi dimana manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dan manajemen lebih mengerti apa yang dapat dicapai dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya
Accounting compliance (AC)	
Persepsi responden mengenai tingkat kepatuhan organisasi dan individu terhadap standar, prinsip, dan prosedur akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan	5 (lima) pernyataan terkait persyaratan, pengungkapan, penyajian informasi,

keuangan (Dasuki & Yudawati, 2022).
objektivitas, kehati-hatian, dan konsistensi penyajian

Penalaran Etis (PE)
Persepsi responden mengenai kemampuan individu dalam menilai benar dan salah, mempertimbangkan norma moral, dan memilih tindakan yang etis dalam situasi kerja (Yulitasari, 2019)
5 (lima) pernyataan terkait tahapan *pre-conventional*, *conventional*, dan *post-conventional*

Accounting fraud propensity (AFP)
Persepsi responden mengenai perilaku manipulatif, salah saji, dan tindakan tidak jujur dalam proses akuntansi (Suryandari et al., 2023a).
6 (enam) pernyataan terkait pengungkapan informasi yang salah, frekuensi salah saji, dan toleransi terhadap kesalahan yang disengaja

Sumber: jurnal-jurnal

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Responden

Kuesioner yang disebarakan berjumlah 105 eksemplar, namun terdapat 1 kuesioner yang tidak kembali sehingga total kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 104 eksemplar. Dengan demikian, tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) mencapai 99%, yang menunjukkan bahwa partisipasi responden dalam penelitian ini sangat tinggi dan data yang diperoleh memiliki tingkat keterpercayaan yang baik untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah
Jabatan	
Kepala LPD	34 orang (32.7%)
Bendahara	35 orang (33.7%)
Teller	35 orang (33.7%)
Jenis Kelamin	
Perempuan	58 orang (55.8%)
Laki-laki	46 orang (44.2%)
Usia	
26-34	9 orang (8.8%)
35-45	20 orang (19.2%)
>46	75 orang (72.1%)
Masa kerja	
<2 tahun	8 orang (7.7%)
≥2 tahun	96 orang (92.3%)
Pendidikan terakhir	
SMA/SMK	38 orang (36.5%)
Diploma	6 orang (5.8%)
S1	58 orang (55.8%)

S2 2 orang (1.9%)

Sumber: data primer (2025)

Berdasarkan Tabel 2, responden penelitian didominasi pegawai yang berpengalaman lebih dari 2 (dua) tahun dan memiliki latar pendidikan yang memadai, sehingga dinilai mampu memberikan jawaban yang relevan terhadap instrumen penelitian.

Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap seluruh variabel penelitian cenderung tinggi. Hal ini terlihat dari nilai mean skala likert seluruh variabel yang berada pada kategori tinggi, yaitu struktur pengendalian internal sebesar 3,83, *compensation fairness* 3,83, *information opacity* 3,82, *accounting compliance* 3,76, penalaran etis 3,78, dan *accounting fraud propensity* 3,73. Temuan ini menunjukkan bahwa responden menilai mekanisme pengendalian internal, *compensation fairness*, *information opacity*, *accounting compliance*, dan penalaran etis dalam lingkungan kerja berada pada tingkat yang relatif tinggi, demikian pula kecenderungan *accounting fraud propensity* juga memperoleh persepsi tinggi. Meskipun demikian, nilai standar deviasi yang berkisar antara 3,31 hingga 4,59 menunjukkan bahwa masih terdapat variasi jawaban antarresponden, terutama pada variabel *accounting fraud propensity* yang memiliki penyebaran jawaban paling besar, sehingga dapat diartikan bahwa persepsi responden terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi lebih beragam dibandingkan variabel lainnya.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std. Dev	Mean skala likert
SP	12	25	19.13	3.31	3.83
CF	12	25	19.17	3.33	3.83
IO	11	25	19.08	3.45	3.82
AC	11	25	18.79	3.54	3.76
PE	12	25	18.92	3.51	3.78
AFP	14	30	22.38	4.59	3.73

Sumber: data diolah (2026)

Uji Instrumen dan Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji instrumen, seluruh butir pernyataan pada masing-masing variabel dinyatakan valid karena memiliki nilai *Pearson Correlation* di atas batas minimum 0,30. Pada variabel struktur pengendalian internal, nilai

korelasi berkisar antara 0,314–0,771; *Compensation Fairness* 0,606–0,681; *Information Opacity* 0,571–0,753; *Accounting Compliance* 0,461–0,815; *Penalaran Etis* 0,341–0,809; dan *Accounting Fraud Propensity* 0,628–0,872. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu mengukur konstruk yang dimaksud. Selain itu, hasil uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's alpha* di atas 0,60, yaitu SP sebesar 0,642, CF 0,651, IO 0,697, AC 0,685, PE 0,714, dan AFP 0,841. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur variabel penelitian, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. Uji Instrumen

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	Cronbach alpha
SP	SP ₁	0.314	0.642
	SP ₂	0.617	
	SP ₃	0.731	
	SP ₄	0.771	
	SP ₅	0.763	
CF	CF ₁	0.616	0.651
	CF ₂	0.681	
	CF ₃	0.675	
	CF ₄	0.651	
	CF ₅	0.606	
IO	IO ₁	0.727	0.697
	IO ₂	0.753	
	IO ₃	0.571	
	IO ₄	0.605	
	IO ₅	0.744	
AC	AC ₁	0.461	0.685
	AC ₂	0.781	
	AC ₃	0.815	
	AC ₄	0.780	
	AC ₅	0.497	
PE	PE ₁	0.341	0.714
	PE ₂	0.662	
	PE ₃	0.718	
	PE ₄	0.809	
	PE ₅	0.807	
AFP	AFP ₁	0.872	0.841
	AFP ₂	0.719	
	AFP ₃	0.628	
	AFP ₄	0.755	
	AFP ₅	0.684	
	AFP ₆	0.863	

Sumber: data diolah (2026)

Tabel 5. Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik	Indikator	Hasil
Normalitas	One Sample Kolmogorov	0.061
	Smirnov	
Multikolinearitas	VIF	

	SP	2.092
	CF	2.940
	IO	4.121
	AC	1.225
	PE	3.689
Multikolinearitas	Tolerance	
	SP	0.477
	CF	0.339
	IO	0.242
	AC	0.815
	PE	0.270
Uji Heteroskedastisitas	Signifikansi Uji Glejser	
	SP	0.122
	CF	0.094
	IO	0.530
	AC	0.229
	PE	0.471
	AFP	0.566

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan analisis. Uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,061, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10, yaitu berkisar antara 1,225 hingga 4,121, serta nilai tolerance di atas 0,10, yaitu antara 0,242 hingga 0,815, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, yaitu berkisar antara 0,094 hingga 0,566, yang berarti model terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

Koefisien Determinasi dan Uji Kelayakan Model

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,87 menunjukkan bahwa 87% variasi *accounting fraud propensity* dapat dijelaskan oleh struktur pengendalian internal, *compensation fairness*, *information opacity*, *accounting compliance*, dan penalaran etis. Sisanya sebesar 13% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat. Hasil uji F juga menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan. Nilai F hitung sebesar 140,437

dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *accounting fraud propensity*.

Pembahasan

Hasil analisis regresi linear berganda disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefisien	t	Sig
Constant	-5.388	-4.466	
PI	0.175	2.479	0.000
CF	0.170	2.043	0.014
IO	0.337	3.543	0.001
AC	0.159	3.157	0.002
PE	0.615	6.923	0.000

Sumber: data diolah (2026)

Persamaan penelitian dapat dituliskan sebagai berikut:

$$AFP = -5.388 + 0.175PI + 0.170CF + 0.337IO + 0.159AC + 0.615PE$$

Pengaruh Struktur Pengendalian Internal terhadap *Accounting Fraud Propensity*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap *accounting fraud propensity*. Temuan ini tidak mendukung *agency theory* dan tidak mendukung *fraud triangle theory*. Dalam *agency theory*, pengendalian internal seharusnya mengurangi perilaku oportunistik agen melalui pembagian tugas, otorisasi, pengawasan, dan monitoring. Dalam *fraud triangle theory*, pengendalian yang kuat semestinya mempersempit peluang terjadinya *fraud* (Coram et al., 2008; Putra & Putra, 2025). Secara empiris, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu. Dewi et al. (2024) menemukan bahwa struktur pengendalian internal berpengaruh negative terhadap *tendency of accounting fraud*. Suryandari et al. (2026) juga menunjukkan bahwa organisasi dengan fungsi audit internal lebih mampu mendeteksi dan melaporkan *fraud*. Selain itu, Nasution et al. (2023) menempatkan efektivitas pengendalian internal sebagai mekanisme yang semestinya menekan *accounting fraud*.

Temuan positif ini dapat diinterpretasikan bahwa struktur pengendalian internal yang dipersepsikan responden kemungkinan lebih mencerminkan keberadaan formal prosedur daripada efektivitas implementasi. Artinya, LPD mungkin telah memiliki pengendalian secara administratif, tetapi belum tentu

menjalankannya secara konsisten dan substantif. Dalam kondisi seperti ini, kontrol formal tidak otomatis menutup peluang *fraud*. Hasil ini menunjukkan bahwa yang lebih penting bukan hanya keberadaan struktur pengendalian internal, tetapi efektivitas penerapan, kualitas pengawasan, dan tindak lanjut atas pelanggaran.

Pengaruh *Compensation Fairness* terhadap *Accounting Fraud Propensity*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *compensation fairness* berpengaruh positif terhadap *accounting fraud propensity*. Temuan ini tidak mendukung *agency theory* dan tidak mendukung *fraud triangle theory*. Secara teoritis, kompensasi yang adil seharusnya menurunkan rasa ketidakpuasan, mengurangi pembenaran atas perilaku curang, dan mendorong hubungan kerja yang lebih sehat. *Fairness* juga dipandang sebagai bagian dari tata kelola yang baik karena menyangkut distribusi hak dan kewajiban secara proporsional (Putra & Putra, 2025).

Secara empiris, hasil ini tidak sejalan dengan Dewi et al. (2024) yang menemukan bahwa *compensation fairness* berpengaruh negatif terhadap *tendency of accounting fraud*. Hasil ini juga tidak sejalan dengan Dasuki & Yudawati (2022) yang menempatkan kesesuaian kompensasi sebagai faktor yang semestinya menurunkan *accounting fraud propensity*. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan arah yang berbeda dari kecenderungan temuan empiris sebelumnya.

Temuan positif ini dapat dijelaskan bahwa *compensation fairness* dalam konteks LPD belum tentu bekerja sebagai faktor penghambat *fraud*. Kompensasi yang lebih baik bisa jadi diberikan kepada jabatan yang lebih strategis, memiliki kewenangan lebih besar, dan akses yang lebih luas terhadap pengelolaan keuangan. Dengan demikian, *compensation fairness* dapat berjalan beriringan dengan peluang penyalahgunaan wewenang yang juga lebih besar. Artinya, *compensation fairness* tetap penting, tetapi harus diiringi dengan pengawasan dan akuntabilitas yang kuat agar benar-benar dapat menekan *fraud*.

Pengaruh *Information Opacity* Terhadap *Accounting Fraud Propensity*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *information opacity* berpengaruh positif terhadap *accounting fraud propensity*. Temuan ini mendukung *agency theory* dan *fraud triangle theory*. Dalam *agency theory*, *fraud* lebih mudah terjadi ketika agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal. Ketertutupan informasi memperbesar peluang untuk menyembunyikan fakta, memanipulasi laporan, dan bertindak demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, semakin tinggi *information opacity*, semakin tinggi pula kecenderungan *fraud* (Putra & Putra, 2025).

Secara empiris, hasil ini sejalan dengan Dewi et al. (2024) yang menemukan bahwa *information asymmetry* berpengaruh positif terhadap *tendency of accounting fraud*. Hasil ini juga sejalan dengan Yulitasari (2019) yang menempatkan *information opacity* sebagai faktor yang berkaitan dengan kecenderungan *fraud*.

Temuan ini menegaskan bahwa ketika informasi lebih banyak dikuasai oleh pihak internal tertentu, peluang untuk menyembunyikan fakta, memanipulasi pencatatan, dan memengaruhi laporan menjadi lebih besar. Dalam konteks LPD, *Information opacity* dapat muncul dalam bentuk akses informasi yang tidak merata, keterbukaan yang terbatas, dan distribusi informasi yang tidak seimbang. Kondisi tersebut memperlemah pengawasan dan memperbesar ruang bagi *fraud*. Oleh karena itu, hasil ini memperlihatkan bahwa penurunan *information opacity* merupakan strategi penting dalam menekan *Accounting fraud propensity*.

Pengaruh *Accounting Compliance* Terhadap *Accounting Fraud Propensity*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *accounting compliance* berpengaruh positif terhadap *accounting fraud propensity*. Temuan ini tidak mendukung *agency theory* dan *fraud triangle theory*. Secara teoritis, *accounting compliance* seharusnya mempersempit ruang manipulasi karena setiap transaksi harus dicatat dan dilaporkan berdasarkan standar yang jelas. Kepatuhan merupakan bentuk disiplin organisasi untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pelaporan keuangan (Putra & Putra, 2025).

Secara empiris, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Nasution et al. (2023) yang menempatkan *accounting compliance* sebagai faktor yang semestinya menekan *accounting fraud*. Hasil ini juga berbeda dengan Dasuki & Yudawati (2022) yang menggunakan *accounting compliance* sebagai konstruk yang secara normatif diarahkan untuk menurunkan *accounting fraud propensity*. Dengan demikian, temuan penelitian ini bergerak berlawanan dengan kecenderungan teori dan penelitian terdahulu.

Temuan positif ini dapat diinterpretasikan bahwa *accounting compliance* yang dipersepsikan responden kemungkinan lebih bersifat formal daripada substantif. Organisasi mungkin telah memenuhi aturan dari sisi dokumen dan prosedur, tetapi belum tentu mencerminkan integritas praktik akuntansi yang sesungguhnya. Dalam situasi seperti ini, *compliance* hadir sebagai formalitas administratif, sementara peluang *fraud* tetap ada. Hasil ini menunjukkan bahwa LPD perlu mendorong *accounting compliance* yang substantif, bukan hanya kepatuhan administratif.

Pengaruh Penalaran Etis terhadap Accounting Fraud Propensity

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran etis berpengaruh positif terhadap *accounting fraud propensity*. Temuan ini tidak mendukung *agency theory* dan *fraud triangle theory*. Secara teoritis, individu dengan penalaran etis yang lebih baik seharusnya lebih mampu menilai konsekuensi etis suatu tindakan dan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan atau membenarkan *fraud*. Penalaran etis juga dipandang sebagai dasar perilaku moral yang lebih kuat (Supriyadi & Prasetyaningsih, 2021; Uddin & Gillett, 2002).

Secara empiris, hasil ini tidak sejalan dengan Supriyadi & Prasetyaningsih (2021) yang menunjukkan bahwa penalaran etis mendorong respons yang lebih etis melalui *whistleblowing*. Hasil ini juga berbeda dengan Uddin & Gillett (2002) yang menunjukkan bahwa penalaran etis berkaitan dengan niat pelaporan keuangan yang curang, sehingga secara teoritis penalaran etis yang lebih kuat semestinya menekan perilaku *fraud*. Dengan demikian, hasil penelitian ini

menunjukkan arah yang berlawanan dengan teori maupun temuan empiris sebelumnya.

Temuan positif ini dapat dibaca bahwa instrumen penalaran etis kemungkinan lebih menangkap pengetahuan moral daripada perilaku aktual. Seseorang dapat mengetahui apa yang benar secara etis, tetapi belum tentu bertindak sesuai dengan pengetahuan tersebut ketika menghadapi tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Dalam konteks LPD, hasil ini menunjukkan bahwa penalaran etis personal belum cukup jika tidak didukung oleh budaya organisasi yang sehat, keteladanan pimpinan, dan sanksi yang konsisten.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur pengendalian internal, *compensation fairness*, *information opacity*, *accounting compliance*, dan penalaran etis terhadap *accounting fraud propensity* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap *accounting fraud propensity*. Temuan ini menunjukkan bahwa determinan fraud tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sistem, prosedur, dan nilai etis secara formal, tetapi juga dengan efektivitas penerapannya dalam praktik organisasi.

Struktur pengendalian internal yang berpengaruh positif menunjukkan bahwa keberadaan prosedur pengendalian belum tentu mampu menekan fraud apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, pengawasan yang efektif, dan tindak lanjut atas penyimpangan. *Compensation fairness* juga berpengaruh positif, sehingga keadilan kompensasi perlu dipahami bukan hanya sebagai instrumen kepuasan pegawai, tetapi juga harus disertai mekanisme akuntabilitas atas kewenangan dan akses terhadap pengelolaan keuangan. *Information opacity* terbukti meningkatkan *accounting fraud propensity*, sehingga keterbukaan informasi, pemerataan akses informasi, dan kualitas pelaporan menjadi solusi penting dalam menekan peluang fraud. *Accounting compliance* yang berpengaruh positif menunjukkan bahwa kepatuhan akuntansi perlu diarahkan pada kepatuhan substantif, bukan sekadar pemenuhan

administratif. Penalaran etis yang berpengaruh positif menunjukkan bahwa pemahaman moral individu belum cukup apabila tidak didukung oleh budaya organisasi yang sehat, keteladanan pimpinan, dan penegakan sanksi yang konsisten.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat pemahaman bahwa accounting fraud propensity pada lembaga keuangan berbasis desa tidak hanya dapat dijelaskan melalui faktor organisasional, tetapi juga melalui faktor informasi dan individu. Integrasi struktur pengendalian internal, compensation fairness, information opacity, accounting compliance, dan penalaran etis dalam satu model penelitian menunjukkan bahwa fraud merupakan persoalan yang kompleks dan tidak cukup dijelaskan hanya dari keberadaan aturan atau sistem formal.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pengelola LPD bahwa upaya pencegahan fraud perlu diarahkan pada penguatan tata kelola yang lebih substantif. LPD perlu memastikan bahwa struktur pengendalian internal dijalankan secara nyata, kompensasi yang adil diikuti dengan akuntabilitas, informasi dikelola secara terbuka, kepatuhan akuntansi diwujudkan dalam praktik pelaporan yang jujur, serta nilai etika diterapkan dalam perilaku kerja sehari-hari. Dengan demikian, pencegahan fraud tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen dan prosedur, tetapi juga pada kualitas implementasi, pengawasan, dan budaya organisasi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada LPD di Kota Denpasar, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh LPD atau lembaga keuangan berbasis desa di daerah lain. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner, sehingga jawaban responden sangat bergantung pada persepsi masing-masing individu. Ketiga, model penelitian hanya menggunakan lima variabel independen, meskipun masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi accounting fraud propensity.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian pada LPD di kabupaten atau

provinsi lain agar hasil penelitian lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan campuran dengan menambahkan wawancara atau studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik fraud, pengendalian, dan budaya organisasi. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain, seperti budaya organisasi, komitmen organisasi, tekanan kerja, gaya kepemimpinan, efektivitas audit internal, atau whistleblowing system, agar model penelitian mampu menjelaskan accounting fraud propensity secara lebih luas.

6. DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2024). *Report to the Nations: 2024 Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. Association of Certified Fraud Examiners. <https://www.acfe.com/report-to-the-nation/2024>
- Coram, P., Ferguson, C., & Moroney, R. (2008). Internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of assets fraud. *Accounting and Finance*, 48(4). <https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2007.00247.x>
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351472898>
- Dasuki, T. M. S., & Yudawati, Y. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada SKPD Kabupaten Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1).
- Dewi, R. O. C., Saputra, K. A. K., & Pramatha, I. M. A. (2024). The Effect of Internal Control System, Information Asymmetry, and Suitability of Compensation on the Tendency of Accounting Fraud (Fraud) in Denpasar City (Opd). *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 2(4). <https://doi.org/10.38142/jogta.v2i4.1014>
- Irianto, D., Rikalmi, R. T., & Munthe, D. V. U. (2025). Analysis of financial statement fraud using the fraud hexagon approach in

- state owned enterprises listed on the indonesia stock exchange. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 9(2), 131–142.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Nasution, A. A., Syekh, I. N., Hasan, A., Padangsidempuan, A. A., Masharif Al-Syariah, J., Ekonomi, J., & Syariah, P. (2023). Determinants of Accounting Fraud On The State Civil Apparatus Ministry Of Religion In Padangsidempuan City. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1).
- Putra, V. A., & Putra, W. M. (2025). Accountability, transparency, and fraud propensity in village governments: The mediating role of justice. *Journal of Accounting and Investment*, 26(2). <https://doi.org/10.18196/jai.v26i2.25650>
- Supriyadi, & Prasetyaningsih, N. U. (2021). The role of moral reasoning on the effects of incentive schemes and working relationships on whistleblowing: An audit experimental study. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 23(3), 215–236. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.64394>
- Suryandari, N. N. A., Bana, E., Ernawatiningsih, N. P. L., & Bhegawati, D. A. S. (2026). The role of auditor personality in detecting corporate fraud. *Corporate Law and Governance Review*, 8(1). <https://doi.org/10.22495/clgrv8i1p1>
- Suryandari, N. N. A., Yadnyana, I. K., Ariyanto, D., & Erawati, N. M. A. (2023a). Determinant of fraudulent behavior in the Indonesian rural bank sector using the fraud hexagon perspective. *Banks and Bank Systems*, 18(4), 181–194. [https://doi.org/10.21511/BBS.18\(4\).2023.16](https://doi.org/10.21511/BBS.18(4).2023.16)
- Suryandari, N. N. A., Yadnyana, I. K., Ariyanto, D., & Erawati, N. M. A. (2023b). Implementation of Fraud Triangle Theory: a Systematic Literature Review. *Journal of Governance and Regulation*, 12(3), 90–102. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i3art10>
- Uddin, N., & Gillett, P. R. (2002). The effects of moral reasoning and self-monitoring on CFO intentions to report fraudulently on financial statements. *Journal of Business Ethics*, 40(1). <https://doi.org/10.1023/A:1019931524716>
- Yulitasari. (2019). Pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi dan moralitas terhadap kecenderungan fraud pada PT sumber graha sejahtera kabupaten luwu. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).